

DEVELOPMENT OF MARITIME ECONOMY AND COASTAL ECONOMY TO IMPROVE COMPETITIVENESS AND COASTAL ECONOMIC GROWTH IN RIAU ISLAND PROVINCE

PENGEMBANGAN EKONOMI MARITIM DAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING DAN PERTUMBUHAN EKONOMI PESISIR DI PROPINSI KEPULAUAN RIAU

Tumpal Manik^{*1)}, Iranita²⁾, Henry Eryanto³⁾, Karuniana Dianta A. Sebayang⁴⁾

^{1,2)} Universitas Maritim Raja Ali Haji (Tanjungpinang, Kepulauan Riau)

^{3,4)} Universitas Negeri Jakarta (Jakarta)

Received: November 11, 2018/ Accepted: April 30, 2019

ABSTRACT

This research aims to analyze and examine the influence of maritime economic development and the economy of coastal communities in improving maritime competitiveness and coastal economic growth. Maritime economics is analyzed based on the fisheries sector, marine tourism and shipping. The economics of coastal communities are analyzed based on community empowerment, development and welfare. This research was conducted in Riau Islands Province. This research uses a qualitative method with a questionnaire of 330 respondents. The processing of research data by validity test, reliability, t-test, F-test and Adjusted R Square. The result of H₁ that maritime economic development affect on competitiveness of maritime regions. Its are the fisheries sector 8.3%, the tourism sector 2.51%. H₂ the economic development of coastal communities affects on competitiveness of maritime regions that are empowerment 23.2%, to increase welfare 31.8%. The development no significant effect. H₃ the maritime economic development affects coastal economic growth through the fisheries sector 18%, the tourism sector 18% and the shipping sector 12.5%. H₄ hypothesis of economic development of coastal communities has significant effect on coastal economic growth, that are at community empowerment 12.5%, welfare 17.2%, development 6.8%.

Keywords: maritime economy, coastal community economics, economic growth.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh pengembangan ekonomi maritim dan ekonomi masyarakat pesisir dalam meningkatkan daya saing maritim dan pertumbuhan ekonomi pesisir. Ekonomi maritim dianalisis berdasarkan sektor perikanan, pariwisata bahari dan perkapalan. Ekonomi masyarakat pesisir dianalisis berdasarkan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan kesejahteraan. Penelitian ini dilakukan di Propinsi Kepulauan Riau menggunakan metode kualitatif dengan kuesioner 330 responden. Pengolahan data penelitian menguji validitas, reabilitas, Uji-t, Uji-F dan Adjusted R². Hasil penelitian bahwa pengembangan ekonomi maritim berpengaruh terhadap daya saing daerah maritim, yaitu sektor perikanan 8,3%, sektor pariwisata 2,51%. Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berpengaruh terhadap daya saing daerah maritim, yaitu pemberdayaan masyarakat 23,2%, peningkatan kesejahteraan 31,8%, sedangkan melalui pembangunan tidak berpengaruh signifikan. Pengembangan ekonomi maritim berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pesisir melalui sektor perikanan sebesar 18%, sektor pariwisata sebesar 18% dan sektor perkapalan 12,5%. Pengembangan ekonomi pesisir berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pesisir, melalui pemberdayaan masyarakat 12,5%, kesejahteraan 17,2%, pembangunan 6,8%.

Kata kunci: ekonomi maritim, ekonomi masyarakat pesisir, pertumbuhan ekonomi

PENDAHULUAN

Propinsi Kepulauan Riau (Kepri) disebut sebagai wilayah maritim sebab wilayah laut lebih luas dari daratan yakni memiliki luas wilayah 251,810.71 km², terdiri dari lautan 241.2153 ka (96%) dan daratan

* Corresponding author : Tumpal Manik, tmanyk@gmail.com

Institution and its address: Faculty of Economy, University of Maritime Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Riau Island

Cite this as: Manik, T et al. (2019). Development of Maritime Economy and Coastal Economy to Improving Competitiveness and Coastal Economic Growth in Riau Island Province. ECSOFiM: Economic and Social of Fisheries and Marine Journal. 06(02): 158-172

Available online at <http://ecsofim.ub.ac.id/>

10.595,41 km² (4%), menyimpan potensi sumber daya maritim antara lain; ekonomi perikanan, pariwisata bahari, perkapalan, transportasi perhubungan laut dan energi laut. Propinsi Kepri memiliki panjang garis pantai 2367.6 km, pantai yang cukup panjang menyediakan banyak lokasi objek wisata bahari dengan pemandangan alami, indah dan bagus, tinggal bagaimana mengembangkannya sebagai sektor pariwisata bahari bagian dari ekonomi maritim, sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan kemakmuran masyarakat khususnya pada Kabupaten Bintan dan Karimun. Salah satu kunci utama keberhasilan pengembangan wilayah adalah kolaborasi yang bersinergi pembangunan antara Propinsi dengan Kabupaten/Kota, akhirnya akan berdampak langsung kepada peningkatan ekonomi daerah maritim dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Keunggulan Propinsi Kepri memiliki potensi ekonomi maritim, antara lain: ekonomi sektor transportasi perhubungan laut, pariwisata bahari, perikanan tangkap, pertambangan dan energi. Potensi ekonomi maritim dan kelauatan, potensi ini sangat mendukung untuk pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, namun sampai saat ini belum banyak yang dapat dikembangkan secara optimal, padahal kekayaan ini akan membuka peluang bagi para calon investor dan investor dibidang kelautan dan maritim yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat pesisir, namun kenyataannya dalam kehidupan masyarakat pesisir masih mengalami kondisi ketidak-pastian hidup yang selalu membayangi kehidupan mereka, khususnya mata pencaharian sebagai nelayan tidak memperoleh penghasilan yang menetap dan tidak pasti untuk menopang kelangsungan hidup mereka secara normal, karena mereka hanya mengaharapkan penghasilan rumah tangga hanya dari hasil laut. Kurangnya perhatian dan komitmen kita membangun sektor ekonomi maritim, sehingga fokus pengembangan sektor ini belum optimal termasuk kebijakan fiskal dan moneter dari ekonomi maritim.

Kita sebagai bangsa Indonesia khususnya masyarakat di Kepri sudah saatnya mengubah paradigma pembangunan dari ekonomi dataran menjadi ekonomi berbasis kemaritim dan kelautan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat pesisir. Sesuai dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul “Pengembangan Ekonomi Maritim dan Ekonomi Masyarakat Pesisir dalam Meningkatkan Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi Pesisir di Propinsi Kepulauan Riau”.

Ketersediaan sumber ekonomi maritim di Propinsi Kepulauan Riau berada posisi yang strategis dan potensial layak menjadi poros maritim. Potensi sumber daya maritim dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi maritim dan ekonomi masyarakat pesisir dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi maritim di Propinsi Kepulauan Riau. Pengembangan ekonomi maritim di Propinsi Kepri dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014, tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal, bidang kelautan dan perikanan, antara lain : 1) perikanan, 2) usaha pengolahan hasil perikanan, 3) pembesaran dan pembenihan ikan laut, 4) usaha pengolahan hasil perikanan, 5) industri penggaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya, 6) usaha pengolahan hasil perikanan, 7) usaha pemasaran, distribusi, perdagangan besar, dan ekspor hasil perikanan.

Potensi sumber daya ikan laut di Laut Cina Selatan dan wilayah Propinsi Kepulauan Riau diperkirakan sebesar 1.057.050 ton/tahun dan diperkirakan wilayah perairan laut Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya ikan sebesar 860.650,11 ton/tahun meliputi ikan pelagis besar sejumlah 53.802.34 ton/tahun, ikan pelagis kecil sejumlah 506.025.30 ton/tahun, ikan demersal sejumlah 272.594,16 ton/tahun, ikan karang sejumlah 17.562.29 ton/tahun, lainnya (cumi, udang, lobster) sejumlah 10.666,02 ton/tahun (BAPPEDA Propinsi Kepulauan Riau, 2016).

Sedangkan menurut data Bappenas (2017), perikanan tumbuh lebih tinggi pada triwulan IV tahun 2017 yaitu sebesar 3,6% (YoY) dari triwulan IV tahun 2016 yang sebesar 2,6% (YoY) meskipun lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,9 persen (YoY). Kinerja ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca pada tahun 2017 yang normal sehingga produksi perikanan tangkap dan budidaya meningkat, sedangkan berdasarkan data statistik perikanan tangkap dan perikanan budidaya 2009, produksi perikanan tangkap dan budidaya di Propinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 230.414,03 ton. Dari jumlah tersebut, 225.675 ton merupakan ikan hasil tangkapan sedangkan sisanya hasil perikanan budidaya. Dengan jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 1.083.500 orang.

Kekayaan sumber daya alam laut dan maritim yang tersedia di wilayah Kepri dapat menunjang pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan potensi kemaritiman. Secara khusus potensi maritim yang dimiliki Propinsi Kepri salah satunya adalah perikanan laut, sehingga pengembangan ekonomi maritim sektor perikanan dapat dilakukan berdasarkan delapan kriteria, antara lain: 1) mengadakan pelatihan di bidang perikanan bagi nelayan, 2) ketersediaan sumber permodalan usaha perikanan, 3) stok bahan bakar kapal untuk nelayan menangkap ikan, 4) ketersediaan peralatan dan teknologi penangkapan ikan, 5) budidaya pengelolaan ikan laut, 6) koperasi nelayan, 7) kemudahan distribusi dan penyaluran ikan ke pasar; 8) kemampuan nelayan memproduksi ikan menjadi agro industri.

Industri pariwisata salah satu sektor pengembangan ekonomi maritim yang produktif dikelola dan dikembangkan sebagai dasar piranti kebijakan percepatan pembangunan utamanya pada wilayah yang bercorak gugus pulau-pulau kecil. Hingga saat ini dukungan pariwisata bahari masih sangat kurang maksimal di Kepri, akibatnya usaha wisata bahari belum berkembang dengan baik. Kontribusi wisata bahari terhadap dunia pariwisata secara umum masih sangat minim. Dengan banyaknya pulau yang sangat indah seharusnya dapat menarik wisatawan lokal dan dunia. Artinya, pulau-pulau tersebut ditetapkan sebagai pulau pariwisata bahari karena memiliki keindahan dan estetika laut yang unik.

Berdasarkan PP No. 50 tahun 2011, memiliki visi yaitu terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat melalui Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan propinsi, rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten dan kota. Pembangunan kepariwisataan nasional meliputi: destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan, hal ini adalah amanah UU No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan Bab IV pasal 7, 8, dan 9 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata.

Daya tarik yang dapat dikembangkan pada pariwisata bahari di Bintan dan Karimun diantaranya adalah wisata bisnis, wisata pantai, wisata alam dan wisata olah raga. Menurut Dahuri (2011), sektor kegiatan pariwisata bahari mencakup kegiatan-kegiatan pariwisata bahari, pariwisata pantai, jasa penunjang pariwisata bahari seperti hotel, penginapan, restoran, rumah makan serta jasa penunjang pariwisata bahari.

Ekonomi maritim bidang industri pariwisata bahari dapat dikembangkan berdasarkan delapan kriteria, antara lain: 1) keindahan objek wisata laut dan pantai; 2) keindahan objek wisata budaya; 3) pengelolaan lokasi wisata pantai; 4) kemudahan transportasi aksesibilitas pariwisata; 5) keamanan dan keselamatan wisatawan; 6) ketersediaan penginapan (losmen, motel atau hotel); 7) akses jaringan komunikasi; 8) ketersediaan akses jaringan perbankan.

Industri perkapalan menopang usaha transportasi laut sebagai elemen ekonomi maritim, industri ini disebut industri padat karya dan padat modal yang memiliki daya saing tinggi, pemegang kewenangan sangat penting adalah pemerintah, maka pihak pemerintah yang menyusun regulasi diharapkan saling berkolaborasi, bekerjasama dengan swasta dalam memfasilitasi elemen pembangunan industri perkapalan dan transportasi laut seperti contoh pelayanan sarana dermaga, pengelolaan pelabuhan dan industri perkapalan (Manik, 2014).

Industri perkapalan menjadi penggerak utama usaha sektor transportasi perhubungan laut. Sesuai dengan posisi letak geografis, bahwa Propinsi Kepri sebagai wilayah maritim yang membutuhkan armada kapal sebagai sarana transportasi utama di laut, sedangkan secara umum potensi produktif pengembangan sektor perkapalan berada diposisi alur laut yang strategis dengan negara tetangga.

Model pengembangan investasi industri maritim bidang perkapalan berdasarkan beberapa faktor, antara lain : a) potensi dan perkembangan industri perkapalan, b) regulasi maupun kebijakan industri perkapalan, c) kebijakan sektor perbankan terhadap pendanaan industri perkapalan, d) sumber daya manusia bidang industri perkapalan, e) keseimbangan kapasitas galangan dengan kuantitas armada kapal, f) ketersediaan galangan kapal nasional dan internasional yang memiliki fasilitas produksi berupa *building berth* atau *graving dock*, g) kebutuhan kapal di dalam negeri, h) industri perkapalan memiliki *multiplier effect*, bahwa industri perkapalan akan mendorong industri lainnya pengolahan besi dan baja, industri pipa, panel listrik dan mesin hingga industri *boiler* (Manik, 2017).

Menganalisis persoalan terkait dengan industri perkapalan dan perhubungan laut, hal ini menyangkut manajemen, sarana-prasarana dan industri produksi perkapalan yang berdampak pada ekonomi kemaritiman, maka landasan pengembangan ekonomi maritim bidang perkapalan dan transportasi laut terdiri dari: 1) ketersediaan industri/pabrik pembuatan kapal laut, 2) kelengkapan peralatan, keamanan atau pelampung transportasi kapal laut, 3) ketersediaan bengkel jasa reparasi kapal laut, 4) kelayakan dermaga atau pelabuhan tempat bersandar kapal, 5) ketersediaan armada kapal antar pulau sebagai transportasi masyarakat, 6) tarif atau ongkos kapal penumpang yang sesuai atau standar jarak wilayah, 7) kemudahan dan ketersediaan BBM untuk transportasi kapal, 8) peraturan atau regulasi transportasi perhubungan laut.

Wilayah pesisir sebagai wilayah daratan yang berbatasan dengan laut, batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut dan intrusi garam, sedangkan batas di laut ialah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan (Bengen, 2001). Wilayah pesisir merupakan sebuah kawasan dinamis yang sangat strategis untuk mengembangkan berbagai sektor usaha. Tetapi sayangnya program pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir belum dilaksanakan secara proporsional. Pemanfaatan sumber daya kelautan belum dikelola secara tepat guna serta semakin buruk akibat timbulnya konflik-konflik kepentingan (Priyanto, 2010).

Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir yang dikaji kemudian dikembangkan melalui penelitian, antara lain: 1) pendampingan pengembangan potensi wilayah pesisir dan pantai berlandaskan budaya dan kearifan lokal, 2) peranan dan partisipasi *stakeholder* atau investor, 3) pendampingan pemerintah setempat, desa, dan lurah mengolah serta meningkatkan potensi sumberdaya pesisir; 4) pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pendidikan dan pelatihan, 5) kelembagaan desa (kopersasi, kelompok nelayan), 6) dana usaha produktif bergulir, 7) pengembangan kreativitas industri kecil pesisir, 8) klusterisasi usaha.

Pengembangan pembangunan pada lokasi pesisir masih ketinggalan dibandingkan dengan daerah daratan, sehingga pesisir yang terkesan jauh dan terisolir, membuat sulit ditembus oleh pasar. Tentu saja, mahalnya transportasi menjadi alasan utama, disamping faktor cuaca buruk yang kerap menjadi penghalang kelancaran pelayaran kapal-kapal pengantar barang. Kurangnya sarana dan prasarana yang bisa dimanfaatkan masyarakat pesisir terlihat seperti wilayah yang terisolir, pada hal potensi sumber daya alam dari daerah pesisir mampu memberikan peningkatan kontribusi pendapatan daerah apabila dikelola dengan baik sesuai dengan muatan dan kearifan lokal.

Batasan secara spasial ekonomi kelautan adalah ke darat adalah wilayah kabupaten/kota pesisir dan ke arah laut adalah wilayah laut sampai ZEE Indonesia serta Landasan Kontinen Indonesia (Kusumastanto, 2014), sedangkan menurut Dahuri (2010), wilayah pesisir dan lautan itu terdapat potensi berbagai sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar, yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal, komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir.

Dasar pengembangan ekonomi masyarakat pesisir melalui pembangunan daerah pesisir di terdiri dari delapan kriteria, antara lain: 1) pemberian bantuan rumah tak layak huni, air bersih dan sanitasi, 2) pembangunan sarana pendidikan, 3) kemudahan transportasi perhubungan laut setiap hari, 4) pembangunan sarana dermaga dan jalan dan penerangan listrik, 5) pemberian bantuan modal usaha industri kecil, menengah, 6) ketersediaan puskesmas dan para medis, 7) pengelolaan dan pengembangan kreativitas industri kecil; 8) ketersediaan lembaga keuangan (Bank, BPR, Koperasi).

Strategi awal penanggulangan kemiskinan pada masyarakat pesisir yaitu dengan mendirikan unit kegiatan masyarakat misalnya mendirikan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Khusus para nelayan adanya bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu membeli peralatan ikan tangkap misalnya penyediaan kapal sederhana, penyediaan jaring atau alat tangkap, sedangkan hasil sumberdaya alam

laut diolah menjadi produk tahan lama dalam bentuk kemasan. Proses pengolahan hasil produksi laut membutuhkan para investor untuk menginventasikan sejumlah dana produksi, karena biaya produksi dilakukan sepanjang tahun (tidak tergantung musim), sehingga hasil sumber daya alam laut atau maritim menjadi produk unggulan yang didistribusikan kepada masyarakat luas termasuk untuk ekspor.

Dasar teori pengembangan ekonomi masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir terdiri dari delapan kriteria, antara lain: 1) ketersediaan jaminan sosial dan kesehatan (BPJS) secara gratis, 2) ketersediaan sarana transportasi, pelabuhan, jalan, puskesmas, sekolah, 3) pendidikan dan pelatihan bagi nelayan, perkebunan, wirausaha, 4) ketersediaan bantuan pendidikan anak dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, 5) kemudahan memperoleh bantuan modal usaha kecil dan menengah, 6) tersedia industri kecil masyarakat pesisir dari keluarga nelayan, 7) ketersediaan koperasi masyarakat pesisir sebagai wadah perekonomian, 8) jaminan keamanan lingkungan daerah pesisir yang aman atau kondusif.

Pengembangan ekonomi maritim dan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir di Kepri sudah saatnya dikelola dan dikembangkan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Menurut Harefa (2009), analisis potensi ekonomi Tanjungpinang, Bintan dan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau sebagai kawasan ekonomi, membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan bidang pajak merupakan daya tarik PMA, namun kebijakan tersebut menghadapi kendala setelah adanya pemerintah daerah otonomi baru, hal ini sangat berpengaruh terhadap jumlah investasi yang masuk khususnya bidang maritim dan kelautan, sedangkan Menurut Pardede (2012), pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan.

Menurut Kusumastanto (2013), pembangunan bidang kelautan belum berperan optimal dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena berbagai kebijakan yang memarjinalkannya, seharusnya Indonesia kembali mengutamakan pembangunan kelautan sesuai jati diri bangsa melalui kebijakan kelautan (*ocean policy*) yang implementatif melalui lima pilar antara lain: a) kebijakan ekonomi kelautan (*ocean economic policy*), b) kebijakan tata kelola kelautan (*ocean governance policy*), c) kebijakan lingkungan laut (*ocean environment policy*), d) kebijakan pengembangan budaya bahari (*maritime culture policy*) dan e) kebijakan keamanan maritim (*maritime security policy*) sehingga ke lima pilar tersebut dijabarkan secara implementatif menjadi program pembangunan negara maritim. Kebijakan tersebut merupakan acuan pembangunan kelautan baik jangka pendek, menengah maupun panjang dalam kerangka besar mengukir masa depan bangsa. Hipotesis yang dikembangkan adalah:

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian di Propinsi Kepulauan Riau yaitu Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun karena ketiga wilayah ini dapat mewakili wilayah lainnya sesuai dengan objek

pengamatan pada ekonomi maritim, ekonomi masyarakat pesisir dan daya saing daerah maritim pada bulan Mei 2018 sampai dengan September 2018.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dikuantitatifkan, dengan alat kuesioner diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dalam kuesioner dengan bilangan atau berbentuk angka sesuai dengan tujuan dan variabel penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dan petugas surveyor dari sumber pertamanya yaitu masyarakat yang tinggal di daerah pesisir antara lain nelayan, buruh harian kapal dan perikanan, pekerja lepas (kelautan, perikanan, pariwisata, perhubungan laut), pengusaha bidang pariwisata, kelautan dan maritim.

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

- H_{1a} : Diduga pengembangan ekonomi maritim sektor perikanan berpengaruh terhadap daya saing daerah maritim.
- H_{3a} : Diduga pengembangan ekonomi maritim sektor perikanan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
- H_{1b} : Diduga pengembangan ekonomi maritim sektor pariwisata berpengaruh terhadap daya saing daerah maritim.
- H_{3b} : Diduga pengembangan ekonomi maritim sektor pariwisata berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
- H_{1c} : Diduga pengembangan ekonomi maritim sektor perkapalan berpengaruh terhadap daya saing daerah maritim.
- H_{3c} : Diduga pengembangan ekonomi masyarakat pesisir sektor perkapalan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
- H_{2a} : Diduga pengembangan ekonomi masyarakat pesisir melalui kegiatan perberdayaan berpengaruh terhadap daya saing daerah maritim.
- H_{4a} : Diduga pengembangan ekonomi masyarakat pesisir melalui kegiatan perberdayaan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
- H_{2b} : Diduga pengembangan ekonomi masyarakat pesisir melalui pembangunan daerah pesisir berpengaruh terhadap daya saing daerah maritim.
- H_{4b} : Diduga pengembangan ekonomi masyarakat pesisir melalui pembangunan daerah pesisir berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
- H_{2c} : Diduga pengembangan ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir berpengaruh terhadap daya saing daerah maritim.
- H_{4c} : Diduga pengembangan ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
- H₅ : Diduga pengembangan ekonomi maritim berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
- H₆ : Diduga pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
- H₇ : Diduga daya saing daerah maritim mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini memiliki variabel bebas lebih dari satu disebut analisis regresi linier berganda. Teknik regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas ($X_1, X_2, X_3, \dots, k$) terhadap variabel terikat (Y). Model regresi linier berganda ditunjukkan sebagai berikut (Supranto, 2004):

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + e$$

Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang berhubungan dengan ekonomi maritim bidang perikanan, pariwisata, perkapalan dan transportasi perhubungan laut pada masyarakat yang tinggal di pesisir. Populasi menggunakan data jumlah penduduk di Tanjungpinang, Bintan dan Karimun sebanyak

586.596 orang (N=586.596), dari data BPS Propinsi Kepri (2016). Sampel penelitian menetapkan responden dari jumlah populasi $N = 586.596$, dihitung dengan rumus slovin menjadi 400 responden.

Indikator Pengembangan Ekonomi Maritim

Mengukur pengembangan ekonomi maritim, peneliti melakukan kontruksi indikator variabel penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Pengembangan ekonomi maritim terdiri dari tiga variabel (perikanan, pariwisata, dan perkapalan) yang mana memiliki indikator pada masing-masing variabel tersebut, sehingga indikator tersebut dapat disusun sebagai berikut:

- 1) Indikator pengembangan ekonomi maritim bidang perikanan adalah pelatihan bidang perikanan untuk nelayan, sumber permodalan usaha perikanan, persediaan bahan bakar kapal, peralatan dan teknologi penangkapan ikan, pengelolaan hasil perikanan masyarakat, koperasi nelayan nelayan, distribusi dan penyaluran ikan ke pasar, produksi ikan menjadi agroindustri ikan laut.
- 2) Indikator ekonomi maritim bidang pariwisata bahari adalah keindahan objek wisata laut dan pantai, keindahan objek wisata budaya, pelestarian, pengelolaan lokasi wisata pantai, transportasi aksesibilitas wisatawan, keamanan dan keselamatan wisatawan, ketersediaan penginapan, akses jaringan komunikasi dan promosi, ketersediaan akses jaringan perbankan.
- 3) Indikator variabel ekonomi maritim bidang perkapalan dan transportasi laut adalah ketersediaan industri/pabrik pembuatan kapal laut, peralatan, keamanan transportasi kapal laut, bengkel servis reparasi kapal, kelayakan dermaga, pelabuhan kapal, transportasi armada kapal antar pulau, penumpang, ketersediaan BBM kapal, regulasi transportasi perhubungan laut.

Indikator Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir terdiri dari tiga variabel (pemberdayaan, pembangunan, dan kesejahteraan) yang berfungsi sebagai komponen dasar dari terbentuknya indikator pada masing-masing variabel, sehingga indikator tersebut dapat disusun sebagai berikut:

- 1) Indikator variabel pengembangan ekonomi masyarakat pesisir bidang pemberdayaan masyarakat pesisir, indikatornya antara lain: pendampingan pengembangan wilayah, partisipasi *stakeholders* atau investor, pengelolaan SDA, kualitas SDM, kelembagaan desa, dana usaha produktif bergulir, pengembangan kreativitas industri kecil, program klasterisasi, peralatan dan distribusi hasil laut.
- 2) Indikator variabel pengembangan ekonomi masyarakat pesisir bidang pembangunan daerah pesisir, indikatornya antara lain: bantuan rumah tak layak huni, air bersih, pembangunan sarana pendidikan, transportasi perhubungan laut setiap hari, pembangunan sarana dermaga, jalan, listrik, pemberian bantuan modal usaha industri kecil, ketersediaan puskesmas dan para medis, kreativitas industri kecil, ketersediaan Bank, BPR, koperasi nelayan.
- 3) Indikator variabel pengembangan ekonomi masyarakat pesisir bidang kesejahteraan masyarakat pesisir, indikatornya antara lain: ketersediaan BPJS secara gratis, sarana pelabuhan, jalan, puskesmas, sekolah, pelatihan wirausaha bagi masyarakat pesisir, ketersediaan bantuan pendidikan, bantuan modal usaha kecil dan menengah, industri rumah tangga masyarakat pesisir, ketersediaan koperasi masyarakat pesisir, keamanan daerah pesisir yang kondusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah kuesioner yang dibagikan dalam tiga wilayah lokasi penelitian yaitu Tanjungpinang, Bintan dan Karimun sebanyak 400 calon responden, total responden yang mengisi kuesioner dan mengembalikan sebanyak 333 orang, terdiri dari 296 orang jenis kelamin laki-laki atau sebesar 89,00% dan 37 orang perempuan sekitar 37,00% responden. Klasifikasi pendidikan terakhir responden antara lain: Sekolah Dasar 57 orang; Sekolah Menengah Pertama 99 orang; Sekolah Menengah Atas 105 orang; Diploma Tiga 9 orang dan Sarjana 25 orang. Pekerjaan responden paling tinggi sebagai nelayan yaitu 199 responden, kedua adalah karyawan swasta yang bekerja di perusahaan ikan, kapal dan dibidang pariwisata sejumlah 44 responden, kemudian diikuti buruh 27 orang, wirausaha 19 orang, PNS 18 orang, IRT 15 orang, honorer 7 orang dan pedagang 4 orang.

Uji validitas menunjukkan nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$, dengan *Correlations* menunjukkan bahwa *Pearson Correlation* $> 0,05$, menunjukkan arah hubungan yang baik artinya pernyataan kuesioner variabel adalah reliabel, Nilai Sig. (2-tailed) $< 0,05$, penelitian valid. Uji reabilitas menunjukkan nilai tabel *Item-Total Statistics* nilai *Corrected Item-Total Correlation* $> r_{tabel}$, angket penelitian *Item-Total Statistics* nilai *Corrected Item-Total Correlation* $> 0,60$ nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$; maka data penelitian reliabel.

Pengembangan Ekonomi Maritim dan Ekonomi Masyarakat Pesisir dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah Maritim

Hasil pengujian pengembangan ekonomi maritim dan ekonomi masyarakat pesisir dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai hipotesis pertama (H_1), yakni variabel ekonomi maritim terdiri dari ekonomi maritim sektor perikanan (H_{1a}), ekonomi maritim bidang pariwisata (H_{1b}) dan ekonomi maritim perkapalan (H_{1c}) dan ekonomi masyarakat pesisir sebagai hipotesis kedua (H_2) terdiri dari: pemberdayaan masyarakat pesisir (H_{2a}), pembangunan daerah pesisir (H_{1b}) dan kesejahteraan masyarakat pesisir (H_{1c}). Hasil pengujian ditunjukkan dalam tabel 1.

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa hasil uji statistik hipotesis pertama dan hipotesis kedua dalam rangkaian persamaan regresi berganda dapat disusun formulasinya yaitu Daya Saing (Y_1) $= 2,369 \alpha + 0,083$ Perikanan $+ 0,251$ Pariwisata $+ 0,037$ Perkapalan $+ 0,232$ Pemberdayaan $+ 0,019$ Pembangunan $+ 0,318$ Kesejahteraan $+ \varepsilon$.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Hipotesis ke-1 (H_{1a} , H_{1b} , H_{1c}) dan Hipotesis ke-2 (H_{2a} , H_{2b} , H_{2c})

Keterangan	Nilai			
R Square	0,677			
Adjusted R Square	0,671			
F hitung	114,020			
Probabilitas	0,000			
Keterangan	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Uji-t	Probabilitas (Sig. α 0,05)
	B	Beta		
(Constant)	2,369		2,453	0,015
Perikanan	0,083	,073	2,038	0,042
Pariwisata	0,251	,374	10,873	0,000
Perkapalan	0,037	,040	1,128	0,260
Pemberdayaan	0,232	,250	5,734	0,000
Pembangunan	0,019	,023	0,512	0,609
Kesejahteraan	0,318	,360	7,583	0,000

Dependent Variable: Daya Saing
Output SPSS V.24, (2018)

Hasil penelitian hipotesis pertama dan hipotesis kedua pengembangan ekonomi maritim dan ekonomi masyarakat pesisir dalam meningkatkan daya saing daerah maritim dapat disimpulkan:

- H_{1a} : Sektor perikanan menjadi bagian dari pengembangan ekonomi maritim berpengaruh signifikan dalam meningkatkan daya saing daerah maritim. Apabila sektor perikanan meningkat maka daya saing daerah maritim akan semakin baik dan meningkatkan sebesar 8,3%. Menurut Adam (2015), kemandirian yang mensejahterakan, salah satunya melalui restorasi ekonomi maritim Indonesia yang berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing sektor maritim.
- H_{1b} : Sektor pariwisata menjadi bagian dari pengembangan ekonomi maritim berpengaruh signifikan dalam meningkatkan daya saing daerah maritim. Jika pariwisata meningkat maka daya saing daerah maritim akan semakin baik dan meningkatkan sebesar 2,51%. Menurut Handayani dan Dedi (2017), sektor pariwisata berpengaruh dalam meningkatkan daya saing Indonesia dengan memanfaatkan potensi maritime yang selama ini belum dikelola secara optimal, dimana indeks daya saing pariwisata Indonesia di ranking 30 dunia.
- H_{1c} : Sektor perkapalan tidak berpengaruh signifikan terhadap daya saing daerah maritim di Tanjungpinang, Bintan dan Karimun. Karena sektor perkapalan mengalami penurunan produksi industri perkapalan dan beberapa usaha galangan kapal telah mengurangi karyawannya karena kurangnya permintaan kapal.
- H_{2a} : Pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi bagian dari pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berpengaruh signifikan dalam meningkatkan daya saing daerah maritim, apabila pemberdayaan masyarakat terus dilaksanakan maka daya saing daerah maritim akan meningkat sebesar 23,2%. Menurut Sadaraianto (2018), pemberdayaan wilayah maritim berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas yang lebih kecil dari 5% yaitu $0,017 < 0,05$ mengindikasikan bahwa pemberdayaan wilayah maritim berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.
- H_{2b} : Sektor pembangunan daerah pesisir belum mendukung dalam meningkatkan daya saing daerah maritim karena sarana dan prasarana belum maksimal dinikmati masyarakat pesisir.
- H_{2c} : Peningkatan kesejahteraan pesisir berpengaruh signifikan terhadap daya saing daerah maritim, apabila kesejahteraan meningkat maka daya saing daerah maritim akan semakin baik maka akan meningkatkan daya saing daerah maritim sebesar 31,8%. Menurut Tinambunan (2016), peran masyarakat desa pesisir dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk tercapainya kesejahteraan dan pembangunan kembali budaya maritim guna meningkatkan daya saing daerah maritim.

Secara simultan variabel pengembangan ekonomi maritim sektor perikanan, sektor pariwisata dan sektor perkapalan memiliki pengaruh sebesar 45,6% terhadap peningkatan daya saing daerah

maritim, sedangkan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir memiliki dampak sebesar 69,3% terhadap pertumbuhan ekonomi pesisir.

Pengembangan Ekonomi Maritim dan Ekonomi Masyarakat Pesisir dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Pengujian hipotesis ketiga (H_3) dengan variabel pengembangan ekonomi maritim terhadap pertumbuhan ekonomi pesisir diuji berdasarkan tiga sektor, yaitu ekonomi maritim bidang perikanan (H_{3a}), bidang pariwisata (H_{3b}) dan perkapalan (H_{3c}) dan Ekonomi maritim perkapalan (H_{1c}) dan Ekonomimi masyarakat pesisir sebagai hipotesis keempat (H_4) terdiri dari: pemberdayaan masyarakat pesisir (H_{4a}), pembangunan daerah pesisir (H_{4b}) dan kesejahteraan masyarakat pesisir (H_{4c}). Hasil pengujian ditunjukkan dalam tabel 2.

Berdasarkan tabel 2 bahwa hasil uji statistik hipotesis ketiga dan hipotesis keempat dalam rangkaian persamaan regresi berganda dapat disusun formulasinya yaitu Pertumbuhan Ekonomi Pesisir (Y_2) = 3,560 α + 0,180 Perikanan + 0,174 Pariwisata + 0,180 Perkapalan + 0,125 Pemberdayaan + 0,172 Pembangunan + 0,068 Kesejahteraan + ε .

Hasil penelitian Hipotesis Ketiga dan Hipotesis Keempat pengembangan ekonomi maritim dan ekonomi masyarakat pesisir dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pesisir dapat disimpulkan, sebagai berikut:

H_{3a} : Pengembangan ekonomi maritim melalui sektor perikanan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pesisir. Sektor perikanan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pesisir, apabila sektor perikanan meningkat maka pertumbuhan ekonomi pesisir (tanjungpinang, bintang dan karimun) akan meningkat sebesar 18% dari persentase perbandingan pertumbuhan ekonomi kepri. Menurut Fauzi (2010), peran sektor perikanan di beberapa negara ditandai peningkatan produksi perikanan dunia secara signifikan.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Hipotesis ke-3 (H_{3a} , H_{3b} , H_{3c}) dan Hipotesis ke-4 (H_{4a} , H_{4b} , H_{4c})

Keterangan	Nilai			
R Square	0,891			
Adjusted R Square	0,891			
F hitung	444,502			
Probabilitas	0,000			
Keterangan	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Uji-t	Probabilitas (Sig. α 0,05)
	B	Beta		
(Constant)	3,560		8,456	0,000
Perikanan	0,180	0,240	9,698	0,000
Pariwisata	0,174	0,344	17,167	0,000
Perkapalan	0,180	0,258	12,302	0,000
Pemberdayaan	0,125	0,189	6,399	0,000
Pembangunan	0,172	0,234	9,849	0,000
Kesejahteraan	0,068	0,102	3,367	0,001

Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi Pesisir
Output SPSS V.24, (2018)

H_{3b}: Pengembangan ekonomi maritim melalui sektor pariwisata berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pesisir, apabila sektor pariwisata meningkat maka ekonomi pesisir akan meningkat sebesar 17,4% dari persentase perbandingan pertumbuhan ekonomi kepri. Menurut Amnar (2017), meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan adalah dengan mengunjungi obyek wisata yang dimiliki oleh suatu daerah.

H_{3c}: pengembangan ekonomi maritim melalui sektor perkapalan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pesisir, apabila sektor perkapalan meningkat maka ekonomi pesisir akan semakin baik sebesar 12,5%. Menurut Akangbe (2015), teknologi dalam bidang perikanan (dalam hal ini termasuk kapal nelayan) yang meningkat, mampu menghemat waktu, meningkatkan laba/ peningkatan pendapatan.

H_{4a}: Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pesisir, apabila pemberdayaan masyarakat terus dikembangkan maka pertumbuhan ekonomi pesisir akan membaik sebesar 12,5%. Menurut Yuliadi (2014), analisis pemberdayaan masyarakat nelayan di pesisir pantai selatan DIY menunjukkan kecenderungan yang terus membaik dimana hasil tangkapan dan nilai tambah produk perikanan terus menunjukkan kecenderungan meningkat.

H_{4b}: Sektor pembangunan daerah pesisir masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pesisir, apabila pembangunan daerah pesisir terus dikembangkan maka pertumbuhan ekonomi pesisir akan semakin baik sebesar 17,2%. Menurut Lembaga Survey dan Kajian Kalimantan Barat (2013), pembangunan ekonomi di wilayah pesisir harus dipandang sebagai suatu mekanisme di mana saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembangunan ekonomi.

H_{4c}: Peningkatan kesejahteraan pesisir berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pesisir, apabila kesejahteraan bagus maka ekonomi pesisir akan membaik sebesar 6,8%. Menurut Carlssona (2005), spektrum yang luas dari informasi tentang proses ekosistem, kesehatan, manfaat dan nilai-nilai ekonomi pesisir sangat penting dikelola dengan baik dan benar dalam mempertahankan modal alam di wilayah pesisir untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Secara simultan hasil penelitian pengembangan ekonomi maritim dan ekonomi masyarakat pesisir dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pesisir yakni secara keseluruhan pengembangan ekonomi maritim berpengaruh sebesar 69,3% terhadap pertumbuhan ekonomi pesisir dan secara simultan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berpengaruh sebesar 79,8% terhadap pertumbuhan ekonomi pesisir.

Pengembangan Ekonomi Maritim, Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Daya Saing dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

Hipotesis berikutnya menguji gabungan variabel ekonomi maritim (H_{5a}), ekonomi masyarakat pesisir (H_{5b}) dan daya saing daerah maritim (H_{5c}) terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Hasil pengolahan data penelitian untuk pengujian hipotesis diuraikan dalam tabel 3.

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa hasil uji statistik Hipotesis Kelima (H_{5a} , H_{5b} , H_{5c}) dalam rangkaian persamaan regresi berganda dapat disusun formulasinya yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Y_3) = $0,061 \alpha + 0,137$ Ekonomi Maritim + $0,148$ Ekonomi Pesisir + $0,144$ Daya Saing Maritim + ε .

Hasil penelitian Hipotesis Kelima (H_{5a} , H_{5b} , H_{5c}) pengembangan ekonomi maritim, ekonomi masyarakat pesisir dan daya saing dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dapat disusun kesimpulan, antara lain:

H_{5a} : Pengembangan ekonomi maritim berpengaruh signifikan sebesar 13,7% dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pesisir. Menurut Yusni (2017), adanya pembangunan subsektor perikanan diharapkan mampu meningkatkan produksi, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan perekonomian daerah.

H_{5b} : Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berpengaruh signifikan sebesar 14,8% dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pesisir. Menurut DKP (2003), meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawsan dan pengembangan ekonomi masyarakat didampingi dengan pengembangan kegiatan sosial, pelestarian lingkungan dan pengembangan infrastruktur untuk mendorong kemandirian masyarakat pesisir.

H_{5c} : Kekuatan daya saing daerah maritim berpengaruh signifikan sebesar 14,4% dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pesisir. Menurut Mahkamah Konstitusi, salah satu tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulaupulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan berkelanjutan.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Hipotesis Kelima (H_{5a} , H_{5b} , H_{5c})

Keterangan	Nilai			
R Square	0,992			
Adjusted R Square	0,992			
F hitung	13503,924			
Probabilitas	0,000			
Keterangan	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Uji-t	Probabilitas (Sig. α 0,05)
	B	Beta		
(Constant)	0,061		0,536	0,592
Ekonomi Maritim	0,137	0,427	63,644	0,000
Ek. Masyarakat Pesisir	0,148	0,545	77,530	0,000
Daya Saing	0,144	0,179	22,013	0,000

Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi Pesisir
Output SPSS V.24, (2018)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitin diatas, maka kesimpulan hasil penelitian ini dapat disimpulkan pengembangan ekonomi maritim berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir sebesar 13,7% dan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berpengaruh signifikan sebesar 14,8% serta daya saing daerah maritim memiliki pengaruh signifikan sebesar 14,4% terhadap pertumbuhan ekonomi pesisir. Secara simultan sebesar 99,2%. Berdasarkan hasil dan interpretasi dari penelitian ini, maka kami sebagai peneliti memberikan saran-saran, antara lain: Pemerintah perlu menyusun matrik, *roadmap* sebagai skala prioritas untuk pengembangan ekonomi maritim dan ekonomi masyarakat pesisir untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di daerah maritim dan pesisir. Agar pemerintahan daerah yang berada di wilayah maritim dan memiliki daerah pesisir perlu menyusun dan menerapkan model pengembangan ekonomi maritim dan ekonomi masyarakat pesisir untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi penelitian lanjutan yang berhubungan dengan ekonomi maritim dan ekonomi masyarakat pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Lukman. 2015. Kebijakan Konektivitas Maritim di Indonesia. *Politica* 6(1): 20-41.
- Akangbe, J.A, et.al. 2015. Effects of improved fish production technology on the output of fish farmers in Ilorin, Kwara State, Nigeria. *Ruhuna Journal of Science* Vol 6: 50-62, Nigeria: Department of Agricultural Extension and Rural Development, University of Ilorin.
- Amnar, Shakhibul, et al. 2017. Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Sabang. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*. Volume IV Nomor I. E-ISSN. 2549-8355.
- BAPEDA Propinsi Kepulauan Riau. 2016, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang 2016-2021 Propinsi Kepulauan Riau.
- Bappenas. 2017. Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan IV Tahun 2017
- Laporan prakarsa staregis Sektor Kemaritiman dan Kelautan, 2016. dalam Dimensi Sektor Unggulan dalam RPJMN 2015-2019
- Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, 2016. Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen Tahun 2016.
- Bengen D. G. 2001, Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor.
- BKPM, 2008. Peningkatan Ilkim Investasi di 33 Proinsi di Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- BKPM, 2011. Kajian Investasi Wilayah Perbatasan. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Komite Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Carlssona, Lars & Berkesb Fikret. Co-management: concepts and methodological implications. *Journal of Environmental Management* 75 (2005) 65–76
- Dahuri, Rokhmin. 2011. Strategi Dan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kelautan. Institut Pertanian Bogor
- DKP RI, 2003. Profil LEPP-M3 dan data kelompok masyarakat pemanfaat (KMP) PEMP TA 2001 – 2003. Direktorat pemberdayaan masyarakat pesisir Ditjen pesisir dan pulau-pulau kecil. Departemen kelautan dan perikanan RI. Jakarta.

- _____, 2010, Melirik Ekonomi Kelautan, Artikel Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor.
- Fauzi, A. 2010. Ekonomi Perikanan. Teori, Kebijakan dan Pengelolaan. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Handayani, Estu dan Dedi, Mohamad. 2017. Pengaruh Promosi Wisata Bahari dan Kualitas Pelayanan terhadap Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Pelabuhan Muncar Banyuwangi. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil 7(2): 151-160.
- Harefa, Mandala (2009), Analisis Potensi Ekonomi Batam, Bintan Dan Karimun Propinsi Kepulauan Riau Sebagai Kawasan Ekonomi. Kajian, Vol 14 No.2
- Kusumastanto, Tridoyo. 2012. Strategi Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim. IPB. Bogor.
- Kusumastanto, Tridoyo. 2013, Pengembangan Ekonomi Maritim: Tantangan Perekonomian Indonesia. Program Studi Pascasarjana Port, Shipping and Logistics Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Lembaga Survey dan Kajian Kalimantan Barat. 2013.
- Manik, Tumpal, 2014. Analisis Pengaruh Industri Maritim Melalui Transportasi Perhubungan Laut, Pariwisata Bahari, Perikanan Tangkap Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Aset (Studi di Propinsi Kepulauan Riau Melalui Pendekatan Analisis Jalur). Penelitian Dosen Pemula Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Manik, Tumpal; Henry Eryanto; Lia Suprihartini. 2017, Pengembangan Investasi Wilayah Perbatasan, Industri Maritim Dan Kawasan Perdagangan Bebas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Di Propinsi Kepulauan Riau. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPEB) Vol. 5 No. 1 Maret 2017 E-ISSN: 2302 – 2663 DOI: doi.org/10.21009/JPEB.005.1.7
- Pardede, Merry Veronika. 2012, Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Sebelum dan Pada Masa Otonomi Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014, Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Bidang Penanaman Modal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk
- Priyanto, D. A. 2010, Analisis Pengembangan Desa-Desa Pantai Bagi Pengelolaan Konflik Penangkapan Ale-Ale (*Meretrix Spp*) Di Perairan Ketapang Kalimantan Barat [Tesis]. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No 3/PUU-VIII/2010, h, 164-165
- RPJMD Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
- Sadaraianto, et al. 2018. The Influence of Maritime Area Empowerment and Training Of Fishermen On The Welfare Of Coastal Communities In Order To Optimize Defense Strategies In The Village Of Gisik Cemandi Sidoarjo Regency. Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta. Vol 4 Nomor 3. Universitas Pertahanan.
- Supranto, J. 2004. Analisis Multivariat Arti dan Interpretasi. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tinambunan, H. S. R. 2016. Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Melalui Penguatan Budaya Maritim Dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean. Fiat Justisia Journal of Law. Volume 10 Issue. 1, January-March 2016. ISSN 1978-5186
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10. Tahun 2009, Tentang Kepariwisata
- Yuliadi, Imamudin. 2014. Potensi Pembangunan Masyarakat Pesisir Selatan DIY Masalah dan Tantangannya. INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 8. No. 2. Hal. 479-500.
- Yusni, Marindi Briska, 2017. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Subsektor Perikanan Tangkap di Pesisir Selatan Kabupaten Tulungagung dengan Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal. Jurnal Teknik ITS Vol 6. No. 2. ISSN: 2337-3520.